

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Sistem demokrasi, sebagai sistem politik yang berkedaulatan rakyat, selalu ditatap sebagai satu-satunya sistem yang mampu menciptakan kemaslahatan bersama (*bonum commune*) dalam sebuah komunitas politik bernama negara. Tesis ini bukan tanpa alasan. Sebab, kalau sistem demokrasi dikomparasikan dengan sistem-sistem lain yang mungkin ada, hanya sistem demokrasi, yang secara konseptual, menghormati manusia sebagai manusia. Artinya, nilai-nilai yang sungguh menjadikan manusia sebagai manusia, semisal keadilan, kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan, dan juga persaudaraan, dilindungi dan dijamin dalam sistem demokrasi. Bahkan, sistem demokrasi mengidealkan satu pemerintahan yang selalu berkiblat pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Namun, apakah dengan tesis-tesis di atas, sistem demokrasi menjadi sistem politik yang tanpa cacat?

Dalam konteks negara Indonesia, sistem demokrasi yang berlaku, yakni Demokrasi Pancasila, selalu berada dalam dua tegangan, yakni kemajuan dan kemunduran. Di satu sisi, ada upaya reformasi politik dan demokratisasi, tetapi di sisi lain ada juga upaya dedemokratisasi dari orang-orang tertentu. Kenyataan ini selalu mewarnai blantika penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia, sejak zaman orde lama, orde baru, bahkan hingga era reformasi dengan agenda utama reformasi politik dan demokratisasi. Memang, harus diakui, secara konseptual-teoretis, Demokrasi Pancasila ditatap mampu mengakomodasi beragam kebutuhan, kepentingan, dan juga perbedaaan dalam diri seluruh rakyat Indonesia. Namun, *de facto*, Demokrasi Pancasila tidak pernah sempurna sebagai sebuah praktik. Sebab, marwah Demokrasi Pancasila acap kali “dilecehkan” dengan beragam perkara, baik yang dilakoni oleh golongan elite maupun warga negara biasa.

Dalam analisis penulis, salah satu patologi serius yang mendesakralisasi marwah demokrasi Indonesia secara amat serius ialah praktik korupsi yang

dilakukan oleh para pejabat publik. Dari masa ke masa, para pejabat publik yang dipilih atau ditunjuk sebagai pelaksana tugas rakyat atau mandataris rakyat acap kali terjebak dalam pusaran korupsi, baik korupsi yang dilakoni secara individu maupun kelompok. Mandat yang diberikan oleh rakyat untuk mengurus rumah tangga pemerintahan secara baik dan bijak demi terciptanya *bonum commune* justru disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok eksklusif yang dangkal. Uang rakyat dikorupsi secara brutal, produk kebijakan acap kali diskriminatif, kultur nepotisme pada lembaga-lembaga pemerintahan, suap-menyuap, dan masih banyak lagi. Semua praktik yang tergolong korupsi ini menjadi panorama lumrah dalam praksis penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia. Konsekuensi paling buruk dari perilaku korup para pejabat publik ini tentu saja dirasakan oleh rakyat kecil yang tidak berdaya secara ekonomi, sosial dan politik. Mereka acap kali didiskreditkan dari urusan politik. Pada titik ini, sistem demokrasi tidak lagi menjadi sistem politik yang berkiblat pada prinsip *bonum commune*, tetapi justru berkiblat pada prinsip *bonum privatum*. Pergeseran prinsip dan orientasi ini tentu mengafirmasi adanya degradasi kualitas demokrasi di Indonesia.

Terhadap kenyataan di atas, konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt bisa dipakai sebagai salah satu pisau pembedah dalam melacak akar korupsi yang dipentaskan oleh para pejabat publik di Indonesia. Bagi Arendt, dengan merujuk pada sosok Adolf Eichmann, kejahatan itu muncul karena anggapan sang pelaku bahwa kejahatan yang ia lakukan merupakan sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Anggapan ini tentu dilatari oleh ketidakmampuan pelaku untuk berpikir dan berimajinasi, terutama ketika dihadapkan pada sebuah sistem, ideologi, atau perintah atasan yang mengondisikannya untuk berbuat jahat. Persis, inilah inti gagasan Arendt tentang banalitas kejahatan.

Dalam konteks perkara korupsi yang dilakoni oleh para pejabat publik di Indonesia, hemat penulis, akar masalah korupsi tersebut ialah ketidakmampuan para pejabat publik untuk berpikir kritis dan berimajinasi (berpikir dari perspektif korban). Mereka tidak mampu mempertanyakan, mengoreksi, serentak mengambil jarak dari sistem yang sudah korup atau dari perintah dan pengaruh atasan yang korup (*worldlessness*). Bahkan, mereka juga tidak mampu melihat tindakannya dari perspektif korban, sehingga mereka tidak mampu memproyeksikan dampak buruk

yang akan ditanggung oleh masyarakat akibat praktik korupsi yang mereka lakukan. Konsekuensinya, aktus korupsi yang mengarah pada pembusukan demokrasi menjadi fakta yang tak terhindarkan dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia.

Berhadapan dengan fakta ketidakberpikiran para pejabat publik di atas, maka mereaktifkan kemampuan berpikir merupakan sebuah kemendesakkan. Sebagaimana Arendt, mereaktifkan kemampuan berpikir nyata dalam tiga aspek, yakni berpikir sebagai dialog dengan diri sendiri, berpikir representatif, dan berpikir sebagai upaya melawan konformitas. Dengan ketiga senjata berpikir ini, para pejabat publik diharapkan mampu mengkritisi, mengoreksi, serentak mengambil jarak dari cara berpikir dan bertindak yang korup. Selain itu, dengan menyalakan pelita berpikir, para pejabat publik tidak gampang dimobilisasi dan diinstrumentalisasi oleh atasan untuk menjadi penjahat demokrasi. Bahkan, dengan mereaktifkan kemampuan berpikir, para pejabat publik akan tampil sebagai tokoh revolusioner. Mereka tidak hanya mengubah sistem, tetapi yang paling utama membentuk habitus serentak kultur bertindak jujur, adil, dan bijaksana di dalam sistem dan diri para pejabat publik sebagai mandataris rakyat. Dengan demikian, demokrasi tidak jatuh pada *bonum privatum*, tetapi sampai pada lahirnya *bonum commune*.

Mereaktifkan kemampuan berpikir para pejabat publik agar tidak terjebak dalam banalitas kejahatan korupsi yang mengarah pada pembusukan demokrasi adalah proses yang panjang. Diperlukan ruang, sistem, dan juga komitmen pribadi yang mampu menggiring dan mengondisikan para pejabat publik agar masuk dalam *solitude*. Sebab, hanya di dalam *solitude*, para pejabat publik mampu berpikir jernih, terutama memikirkan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Apabila rakyat ditempatkan pada posisi yang sentral, maka peluang untuk bertindak korup bisa diminimalisasi dan bahkan tidak ada sama sekali. Dengan demikian, sistem Demokrasi Pancasila tidak dimonopoli oleh segelintir kaum elite saja, tetapi mengabdikan pada kepentingan umum.

#### **4.2 Catatan Kritis**

Setelah membaca dan mencermati keseluruhan karya ilmiah ini, penulis memiliki dua catatan kritis. *Pertama*, konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt

tidak bisa dipakai dalam membedah kasus kejahatan yang terorganisir, terstruktur, dan sistematis. Sebab, dalam kasus-kasus kejahatan yang terorganisir, terstruktur, dan sistematis, aktivitas berpikir memainkan peran yang luar biasa, baik berpikir tentang taktik, jumlah personil yang diperlukan, senjata yang dibutuhkan, atau pun risiko yang akan ditanggung, baik oleh pelaku maupun korban. Hitler, misalnya, adalah sosok penjahat kemanusiaan yang sudah memikirkan strategi, jumlah personil yang dibutuhkan di lapangan, atau dampak buruk dari tindakannya tersebut. Itu artinya, dalam beberapa kasus, semisal kejahatan Hitler, kejahatan tidak disebabkan oleh ketidakberpikiran, tetapi justru kejahatan itu terjadi karena ditopang oleh orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jeli, kritis, dan juga taktis.

*Kedua*, mereaktifkan kemampuan berpikir sebagai solusi atas ketidakberpikiran para pejabat publik yang bertindak korup di Indonesia hanya mungkin terjadi apabila ada komitmen pribadi. Sebab, banalitas kejahatan melihat akar korupsi dari kacamata sang koruptor. Karena itu, solusi berpikir kritis hanya akan terealisasi apabila sang koruptor dan para pejabat publik yang lain memiliki kemauan dan keterbukaan untuk berpikir. Tanpa ada komitmen pribadi, aktivitas berpikir sebagai solusi atas ketidakberpikiran menjadi sia-sia.

### **4.3 Saran**

Karya ilmiah ini memiliki titik aksentuasi pada perilaku atau tindakan para pejabat publik yang korup. Tindakan ini telah mendatangkan prahara yang luar biasa bagi sistem demokrasi di Indonesia. Karena itu, ada dua saran dari penulis yang ditujukan kepada dua pihak.

*Pertama*, rakyat Indonesia mesti mengaktifkan fungsi kontrol terhadap para pejabat publik yang sudah dipilih atau ditunjuk untuk menduduki jabatan publik tertentu. Fungsi kontrol menjadi sangat penting agar seluruk gerak-gerik para pejabat publik bisa dipantau secara jelas, tegas, dan kritis. Fungsi kontrol tersebut bisa dieksekusi sewaktu pemilihan umum, aspirasi di media massa, demonstrasi, dan lain sebagainya.

*Kedua*, penulis menganjurkan atau menyarankan agar aktus mereaktifkan kemampuan berpikir kritis menjadi gerakan bersama seluruh pejabat publik sebagai mandataris rakyat. Penulis percaya bahwa semua pejabat publik yang dipilih dan

ditunjuk memiliki cara berpikir revolusioner-konstruktif. Namun, dalam beberapa kesempatan, ketajaman berpikir acap kali tunduk di hadapan sistem dan juga kendali atasan yang korup. Ada banyak pejabat publik yang tidak bisa berbuat banyak ketika dikonfrontasikan dengan kepentingan dan perintah atasan (situasi *worldlessness*). Itulah sebabnya, dengan menjadikan aktivitas berpikir sebagai gerakan bersama, ada prospek besar yang muncul bahwa para pejabat publik tidak gampang dimobilisasi dan diinstrumentalisasi, baik oleh sistem maupun oleh perintah atasan, untuk melancarkan praktik korupsi. Dengan demikian, kualitas demokrasi di Indonesia tetap terjaga dan idealisme reformasi, yakni menciptakan reformasi politik dan demokratisasi bisa tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Sugiarto, R. Toto dkk. *Ensiklopedi Pancasila: Arti Pancasila dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2021.

### BUKU

Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*. Penerj. Al Ghozie Usman, Jakarta: LP3ES, 1986.

Arendt, Hannah. *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. New York: Penguin Books, 1994.

..... *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

..... *Asal-Usul Totalitarianisme Jilid III: Totalitarianisme*. Terj. J.M. Soebijanta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

..... *Men In Dark Times*. New York: A Harvest Book, Harcourt, Brace and World, Inc., 1995.

Asmara, Adhy. *Pak Harto dan Pancasila*. Bandung: Carya Remadja, 1982.

Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. "Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia," dalam Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, ed. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov, 2015.

Badan Pengkajian MPR RI. *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.

Benhabib, Seyla. "Arendt's Eichmann in Jerusalem," in Danna Villa, ed. *The Cambridge Companion to Hannah Arendt*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

- Berkowitz, Roger. "Solitude and the Activity of Thinking," in Roger Berkowitz dkk., ed. *Thinking in Dark Times: Hannah Arendt on Ethics and Politics*. New York: Fordham University Press, 2010.
- Bernstein, Richard J. "Is Evil Banal? A Misleading Question," in Roger Berkowitz dkk., ed. *Thinking in Dark Times: Hannah Arendt on Ethics and Politics*. New York: Fordham University Press, 2010.
- Bubandt, Nils. *Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia*. New York: Routledge, 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. USA: Yale University Press, 1989.
- ..... *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi secara Singkat*. Terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Darmodiharjo, Darji. *Pancasila, Suatu Orientasi Singkat*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, 1980.
- Daven, Mathias. "Politik Pemusnahan dan Pemusnahan Politik, Telaah Kritis atas Konsep Hannah Arendt tentang Totalitarisme," dalam Otto Gusti Madung dan John Mansford Prior, ed. *Berani Berhenti Berbohong, 50 Tahun Pascaperistiwa 1965-1966*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fakih, Mansur. "Catatan Perjalanan Panjang Menuju Demokrasi," sebuah pengantar dalam Dadang Juliantara. *Meretas Jalan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- Harman, Benny K. *Negeri Mafia Republik Koruptor: Menggugat Peran DPR Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2012.

- Huntington, Samuel P. "Modernization and Corruption," dalam Arnold J. Heidenheimer, ed. *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis*. New York: Routledge, 2017.
- Indiahono, Dwiyanto. Birokrat (Bukan) Pelayan Koruptor, Telaah Korupsi, Demokrasi, dan Pro-Poor Policy di Era Reformasi. Yogyakarta: Gaya Media, 2015.
- Ismael, Basuki. *Jendela Demokrasi: Telaah Etika, Budaya, dan Politik*. Jakarta: Tunasmedia Grafikindo, 1993.
- Jaweng, Robert Na Endi. Empat Wajah Desentralisasi: Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Buku Kompas, 2022.
- Juwono, Vishnu. *Membasmi Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*. Terj. Noor Cholis. Jakarta: KPG, 2018.
- Keladu Koten, Yosef. *Etika Keduniawian: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- ..... "Kejahatan Melawan Kemanusiaan dan *Worldlessness*," dalam Otto Gusti Madung dan John Mansford Prior, ed. *Berani Berhenti Berbohong, 50 Tahun Pascaperistiwa 1965-1966*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Lechte, John. *50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Postmodernisme*. Terj. A Gunawan Admiranto. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Lubis, Mochtar. "Pengantar," dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, ed. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Madung, Otto Gusti. *Post Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.



- Magnis-Suseno, Franz. "Kata Pengantar," dalam Hannah Arendt. *Asal-Usul Totalitarianisme Jilid III: Totalitarianisme*. Terj. J.M. Soebijanta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- ..... *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Muhardiansyah, Doni dkk. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: KPK, 2010.
- Nadrilun. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Pabottingi, Mochtar. "Arah Skalpel atas Korupsi," sebuah pengantar dalam Saldi Isra. *Catatan Hukum Saldi Isra, Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Poespowardojo, T.M. Soerjanto dan Alexander Seran. *Diskursus Teori-Teori Kritis: Kritik atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer*. Jakarta: Buku Kompas, 2016.
- Priyono, B. Herry. *Kebebasan, Keadilan dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- ..... *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingan dengan Negara-Negara Lain*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2019.
- Rohdewohld, Rainer. "Decentralisation and the Indonesian Bureaucracy: Major Changes, Minor Impact?," in Edward Aspinal and Greg Fealy, ed. *Local Power and Politics in Indonesia, Decentralisation and Democratisation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Rosidi, Ajib. *Korupsi dan Kebudayaan, Sejumlah Karangan Lepas*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2006.

- Rustanto, Bambang. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Senior, Ian. *Corruption-The World's Big C: Cases, Causes, Consequences, Cures*. London: The Institut of Economic Affairs, 2006.
- Setiyono, Budi. "Demokrasi, Good Governance, dan Kesejahteraan," dalam Wijayanto dkk., ed. *Demokrasi Tanpa Demos, Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: LP3ES, 2021.
- Smith, Theodore M. "Korupsi, Tradisi, dan Perubahan di Indonesia," dalam Mochtar Lubis dan James Scott, ed. *Korupsi Politik*. Terj. S Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Suaedy, Ahmad. "Melacak Basis Etika Antikorupsi di Indonesia: Menyandingkan Gus Dur dengan Pangeran Diponegoro," dalam Wijayanto dkk., ed. *Demokrasi Tanpa Demos, Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: LP3ES, 2021.
- Sukrisno, Subur. *Sejarah Korupsi di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2017.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Taopan, M. *Demokrasi Pancasila: Analisa Konseptual Aplikatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Wattimena, Reza A.A. *Filsafat Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.
- Wijayanto, Aisah Putri Budiarti, dan Herlambang P. Wiratraman. "Demokrasi Tanpa Demos: Sebuah Pengantar," pengantar dalam Wijayanto, dkk., ed. *Demokrasi Tanpa Demos, Refleksi 100 Ilmuwan Sosial dan Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: LP3ES, 2021.
- Wiranggani, Panjalu. *Tipologi Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2015.

Young-Bruehl, Elisabeth. *Hannah Arendt, For Love of the World*. New Haven, CT: Yale University Press, 1982.

### **JURNAL ILMIAH**

Arendt, Hannah. "Thinking and Moral Considerations: A Lecture." *Social Research*, 38:3, (1971).

Daven, Mathias. "Korupsi dan Demokrasi." *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.

Juwono, Vishnu. "Kepemimpinan Politik dalam Mendorong Inisiatif Antikorupsi". *Jurnal Prisma*, 38:2, (2019).

Keladu Koten, Yosef. "Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir." *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.

..... "Nilai Partisipasi Politik dalam Terang Etika Politik Aristoteles." *Jurnal Ledalero*, 7:2, Desember 2008.

Madung, Otto Gusti. "Korupsi, Patronase, dan Demokrasi." *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.

### **MAJALAH**

Irfany, Robby. "Bocor Bantuan di Banyak Jurusan." *Koran Tempo*, 22 Desember 2020.

Kaisiepo, Manuel. "Otokrasi Elektoral dan Demokrasi Cacat." *KOMPAS*, 12 Maret 2024.

Redaksi. "Biaya Politik Membengkak." *KOMPAS*, 8 Desember 2023.

..... "Kajari Bondowoso Tersangka Korupsi." *KOMPAS*, 17 November 2023.

..... "KPK Telusuri Indikasi Aliran Dana ke Nasdem." *KOMPAS*, 14 Oktober 2023.

Sakti, Rangga Eka. "Kinerja Politik Diapresiasi, Penegakan Hukum Masih Mengganjal." *KOMPAS*, 13 Desember 2023.

Soetiardjo, Budi Sartono. "Sarjana Koruptor." *KOMPAS*, 21 Juni 2023.

Sukidi. "Menyelamatkan Demokrasi Kita." *KOMPAS*, 23 November 2023.

Sukma, Rizal. "Korupsi dan Demokrasi." *KOMPAS*, 13 April 2023.

Tanuredjo, Budiman. "Republik Korupsi." *KOMPAS*, 25 Maret 2023.

Latif, Yudi. "Korupsi Politik." *KOMPAS*, 11 Februari 2021.

## INTERNET

Adri, Aguido. "Firli Bahuri Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Kasus Pemerasan." *Kompas.id* 23 November 2023.

<<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/11/23/polisi-tetapkan-firli-bahuri-sebagai-tersangka>>, diakses pada 26 Februari 2024.

Anugerah, Boi dan Jacob Junian Endiartia. "Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat." *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 6:2, Juni 2018. <<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/119/41>>, diakses pada 29 Januari 2024.

Burdon, Peter dkk. "Reflection on Hannah Arendt and Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil." *Adelaide Law Review*, 35:2, (2014). <<https://law.adelaide.edu.au/ua/media/584/ch10-alr-35-2-burdon.pdf>>, diakses pada 12 April 2024.

Ginting, Miko. "Terbukti Terima Suap, Hakim DS Diberhentikan Tidak dengan Hormat." *komisiyudisial.go.id* 9 Agustus 2023.

[https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers\\_release\\_detail/293/terbukti-terima-suap-hakim-ds-diberhentikan-tidak-dengan-hormat](https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/293/terbukti-terima-suap-hakim-ds-diberhentikan-tidak-dengan-hormat), diakses pada 23 Februari 2024.

Javier, Faisal. "Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan." *tempo.co*, 20 Februari 2023. <https://data.tempo.co/data/1642/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>, diakses pada 30 Maret 2023.

- KPK RI. “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan.” *kpk.go.id* 22 Januari 2024. <<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>>, diakses pada 23 Februari 2024.
- Lay, Sergius. “Hannah Arendt: Pendidikan dan Natalitas.” *JURRAFI*, 3:1, April 2024. <<https://prin.or.id/index.php/JURRAFI/article/download/2804/2547/8340>>, diakses pada 3 Juni 2024.
- Martiar, Nobertus Arya Dwiangga. “Johny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara, Langsung Banding.” *Kompas.id* 8 November 2023. <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/08/johny-g-plate-divonis-15-tahun-penjara-langsung-banding>>, diakses pada 26 Februari 2024.
- Martiar, Norbertus Arya Dwiangga. “Korupsi Rugikan Negara Ratusan Triliunan Rupiah.” *Kompas.id* 8 Januari 2023. <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/08/dampak-korupsi-rugikan-negara-ratusan-triliun-san-triliun>>, diakses pada 26 Februari 2024.
- Nugroho, Hastanti Widy. “Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Ditinjau dari Perspektif Filsafat Politik Hannah Arendt.” *Makalah 4<sup>th</sup> International Conference on Indonesian Studies Bali*, 9-11 Februari 2012. <[https://www.researchgate.net/publication/287682479\\_PERAN\\_POLITIK\\_PEREMPUAN](https://www.researchgate.net/publication/287682479_PERAN_POLITIK_PEREMPUAN)>, diakses pada 21 Maret 2024.
- Rizkoh, Fathul. “Kades di Lebak dan Suaminya Jadi Tersangka Kasus Pemerasan Rp 345 Juta.” *Detiknews* 16 November 2023. <<https://news.detik.com/berita/d-7039832/kades-di-lebak-dan-suaminya-jadi-tersangka-kasus-pemerasan-rp-345-juta>>, diakses pada 7 Maret 2024.
- Safitri, Eva. “LSI Denny JA: Golput Pilpres 19,27 %, Golput Pileg 30,05 %.” *detik.com* 18 April 2019. <<https://news.detik.com/berita/d-4516324/lsi-denny-ja-golput-pilpres-19-27-golput-pileg-30-05>>, diakses pada 26 Februari 2024.
- Santika, Erlin F. “Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun.” *databoks.katadata.co.id*, 31 Januari 2024.

<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun>>, diakses pada 2 Mei 2024.

Sanusi, H. M. Arsyad. "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan." *Jurnal Konstitusi*, 6:2, Juli 2009. <<https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=pstream-pdf&fid=3723&bid=3724>>, diakses pada 16 Februari 2024.

Subarkah, Tri. "Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia masih Cacat." *Media Indonesia* 16 Februari 2024.

<<https://www.google.com/amp/s/mediaindonesia.com/amp/politik-dan-hukum/651955/angka-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat>>, diakses pada 3 Mei 2024.s

Suraji. "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya." *Jurnal Kebijakan dan Adminitrasi Publik UGM*, 12:2, November 2008. <<https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/download/8404/6495>>, diakses pada 16 Februari 2024.

Susanti, Bivitri. "Atas Nama Pembangunan." *Kompas.id* 11 November 2021. <<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/11/atas-nama-pembangunan>>, diakses pada 10 Maret 2024.

Syuraida, Himkatus. "Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama hingga Era Reformasi." *e-Jurnal AVATARA*, 3.2, Juli 2015. <<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12011/11203>>, diakses pada 5 Februari 2024.

The Museums's Holocaust Encyclopedia. "Persidangan Nuremberg." *Ensiklopedia Holocaust*. <<https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/the--nuremberg-trials>>, diakses pada 17 April 2024.

TII. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023: Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol." *ti.or.id* 30 Januari 2024. <<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/>>, diakses pada 23 Februari 2024.

Tim Floresa. “Gelar Unjuk Rasa, Warga POCO Leok Tuntut Bupati Manggarai Cabut SK Penetapan Lokasi Proyek Geothermal.” *Floresa.co* 9 Agustus 2023. <<https://floresa.co/reportase/mendalam/55583/2023/08/09/gelar-unjuk-rasa-warga-poco-leok-tuntut-bupati-manggarai-cabut-sk-penetapan-lokasi-proyek-geothermal>>, diakses pada 5 Maret 2024.

Wikipedia Bahasa Indonesia. “Adolf Eichmann.” *WIKIPEDIA*. <[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adolf\\_Eichmann](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann)>, diakses pada 20 Maret 2024.